

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia telah hidup bersama wabah penyakit sejak dahulu kala, karena terjadi beberapa wabah penyakit sejak dahulu kala, terdapat beberapa wabah penyakit besar yang melanda dunia dalam skala yang besar diantaranya The Black Death yang muncul pada tahun 1340an dan 1350an, dan Wabah Cacar yang telah melanda dunia sejak abad ke -18 serta Wabah Flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 (Sukmawati, 2021). Menurut Pedoman Tatalaksana Covid-19, di Indonesia pada dasarnya telah banyak mengalami pengalaman yang cukup panjang yang berkaitan dengan terjadinya penularan penyakit secara luas yang biasa disebut dengan wabah. Dalam jangka waktu 20 tahun terakhir, terdapat beberapa penyakit virus yang telah menyebabkan epidemi seperti *severe acute respiratory syndrome coronavirus* (SARS-CoV) pada tahun 2002 – 2003, Influenza H1N1 pada tahun 2009 dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS-CoV) yang pertama kali teridentifikasi di Saudi Arabia pada tahun 2012 (Burhan et al, 2022). Wabah yang saat ini sedang dialami negara Indonesia dan hampir seluruh negara mengalami adalah wabah dari penyakit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang pertama kali terdeteksi di China pada akhir tahun 2019 dan karakter virus ini menyerang pernapasan serta penyebarannya melalui antara manusia ke manusia (WHO, 2020).

Dampak yang terjadi akibat Covid-19 dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, menggoyang pilar – pilar perekonomian, mengancam stabilitas sistem keuangan, menghantam ketahanan sosial masyarakat miskin serta menimbulkan tekanan yang besar terhadap kesehatan fiskal (Hamidi, et al., 2020). Banyak negara yang berupaya didalam mengantisipasi penyebaran virus ini, namun kurangnya kesiapan oleh Pemerintah membuat upaya tersebut kurang maksimal oleh sebab itu negara – negara yang mengalami wabah Covid-19 tersebut terkesan tertutup dalam menginformasikan terkait penanganan wabah Covid-19 termasuk Pemerintahan Indonesia. Di Indonesia data yang diperoleh

berdasarkan pantauan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, per tanggal 17 Mei 2022 bahwa terdapat 6.051.205 pasien positif, 5.890.826 pasien sembuh dan sebanyak 156.481 yang meninggal dunia. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 seperti pembatasan pergerakan masyarakat yang diawali dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga PPKM empat level (Permatasari, 2021).

Dengan munculnya wabah Covid-19 akan sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Menurut Hayati, dengan adanya kontraksi pada tahun 2020 Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang didukung oleh Pemerintah daerah sebagai peran utama pada pergerakan pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah berperan dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah agar tidak mengancam kondisi keuangan Pemerintah daerah yang akan memberikan pengaruh kepada pelayanan publik sehingga situasi menggambarkan kesehatan fiskal Pemerintah daerah yang tidak baik (Pratiwi, 2022). Kesehatan fiskal yang baik pada Pemerintah daerah apabila kondisi keuangannya sehat dan mampu membiayai kewajiban keuangan daerahnya serta dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat (Honadle, et al. 2004). Informasi kondisi keuangan atau biasa disebut dengan kesehatan fiskal pada Pemerintah daerah sangat penting untuk dapat menggambarkan kapasitas keuangan Pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat (Casal dan Gomez, 2011).

Menurut Huang Ju (2013) menyatakan bahwa informasi kesehatan fiskal bagi Pemerintah memiliki suatu peran yang cukup penting karena merupakan indikasi kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan dan pemberian layanan kepada masyarakat. Berdasarkan isi dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa, implikasi pandemi Covid – 19 berdampak terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global dan perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, baik dari sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan.

Dampak yang terjadi dari adanya wabah Covid-19 jika dinilai dari sudut pandang ekonomi, maka dapat dibedakan menjadi 2 sisi yaitu permintaan dan penawaran (Damuri dan Hirawan, 2020). Apabila dilihat dari sisi permintaan menurut Handoko yang merupakan anggota DPRD DIY, dampak yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Dari sisi penawaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi nasional adalah menurunnya angka investasi diberbagai sektor usaha. Dengan adanya pandemi ini menimbulkan ketidakpastian yang berimbas pada banyaknya masyarakat yang ragu untuk memulai investasi, keraguan tersebut mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan (DPRD DIY, 2021).

Dari sudut pandang pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi bahwa pendapatan negara sebesar 10 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 diawal terjadinya wabah Covid-19 hal itu disebabkan penerimaan perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif Pajak Penghasilan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turun dampak jatuhnya harga komoditas. Pemerintah mengeluarkan dana insentif pajak untuk mendukung dunia usaha serta orang pribadi yang terdampak pelambatan ekonomi dan mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan dampak Covid-19 hingga Rp 405, 1 triliun. Dengan adanya kondisi seperti ini telah menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan adanya penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik (Friana, 2020). Oleh sebab itu dibutuhkan upaya dari Pemerintah untuk melakukan penyelamatan dan pengambilan langkah – langkah luar biasa.

Salah satu langkah luar biasa yang dilakukan Pemerintah pusat adalah dengan membuat kebijakan baru dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di daerah dengan memberikan pinjaman kepada daerah yang disebut dengan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, bahwa Pinjaman PEN daerah merupakan dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi di daerah yang terimbas Covid-19. Pemerintah pusat memberikan relaksasi batasan penjaminan pinjaman PEN pada Pemerintah daerah. Untuk mendukung kebijakan dalam pemberian

pinjaman PEN pada Pemerintah daerah, maka perlu dilakukan analisis Kesehatan Fiskal pada Pemerintah daerah sehingga pemberian pinjaman tersebut tidak akan menimbulkan masalah baru yang memberatkan Pemerintah daerah penerima pinjaman pada saat atau periode pengembalian pinjaman PEN.

Menurut Honadle, et al. (2004), terdapat beberapa faktor yang dapat menggambarkan suatu kesehatan fiskal pada Pemerintah daerah yaitu: pendapatan (*revenues*), pengeluaran (*expenditure*), posisi operasi (*operating position*) dan struktur utang (*debt structure*). Dalam pendapatan akan dianalisis mencakup seluruh jenis penghasilan seperti penerimaan pajak (*tax revenues*), biaya dan retribusi (*fees and charge*), bantuan antar Pemerintah (*intergovernmental aid*). Pengeluaran mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan pengeluaran untuk layanan (*debt services*), pengeluaran umum (*general expenditure*) dan pengeluaran untuk modal proyek (*capital projects*).

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan kesehatan fiskal Pemerintah daerah sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 pernah dilakukan oleh Baehaqi dan Astuti (2020), Suryawati dkk (2018), Maizunati (2017), Iqbal dkk. (2017), Ritonga, et al. (2012, 2019) di Indonesia,

Lativa (2021) telah melakukan penelitian mengenai kebijakan fiskal yang dilakukan pada saat telah terjadinya Pandemi Covid-19 dalam rangka untuk dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan dengan topik penelitian yang sama juga telah dilakukan oleh Silalahi dan Ginting (2020), mengenai strategi kebijakan fiskal Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Penelitian yang dilakukan oleh Wibawa dan Putri (2021) membahas hal yang serupa tentang penilaian kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19. Serta dengan tinjauan awal dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi fiskal Pemerintah daerah oleh Qibthiyyah (2021). Namun sampai pada saat ini, masih belum ditemukan penelitian terkait perbandingan dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kesehatan Fiskal antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dibutuhkan oleh Pemerintah Pusat dalam pemberian pinjaman PEN, dan juga bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan bantuan fiskal kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yang akan dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana Tingkat Kesehatan Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebelum Pandemi Covid-19.
2. Bagaimana Tingkat Kesehatan Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada saat Pandemi Covid-19.
3. Bagaimana Perbedaan Tingkat Kesehatan Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Sebelum dan pada saat Pandemi Covid-19.
4. Analisis Rasio yang memiliki perbedaan pada perubahan Tingkat Kesehatan Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebelum dan pada saat Pandemi Covid-19.

1.3 Tujuan Penelitian

Peran penting kesehatan fiskal bagi Pemerintah daerah adalah untuk menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan dan pelayanan publiknya. Terkait adanya Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi perubahan kebijakan yang akan berdampak pada stabilitas keuangan Pemerintah pusat dan juga Pemerintah daerah. Sedangkan kebijakan desentralisasi fiskal yang ada di Indonesia belum mampu menghasilkan pendapatan yang mencukupi untuk dapat menutupi kebutuhan belanja daerah yang cenderung mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, analisis perubahan tingkat kesehatan fiskal sangat dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan fiskal oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah seperti Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menentukan Tingkat Kesehatan Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebelum Pandemi Covid-19.
2. Menentukan Tingkat Kesehatan Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada masa Pandemi Covid-19.
3. Melihat Perbedaan Tingkat Kesehatan Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat sebelum dan pada masa Pandemi Covid-19.

4. Melakukan Analisis Rasio yang memiliki perbedaan pada perubahan Tingkat Kesehatan Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebelum dan pada saat Pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai upaya untuk dapat mewujudkan kesehatan fiskal Pemerintah daerah yang maksimal dan baik, peneliti berharap jika hasil dari penelitian ini dapat:

1. Memberikan sebuah informasi dan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat serta sebagai acuan atau pedoman dalam mewujudkan kesehatan fiskal Pemerintah daerah yang baik.
2. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam menambah ilmu pengetahuan serta informasi terkait dengan kesehatan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang berhubungan dengan kesehatan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang dibagi dalam tiga bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar dari inti penulisan yang secara menyeluruh.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. Penjelasan landasan teori pada bab ini berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literatur dalam penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian

Menguraikan jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang akan digunakan. Pada bab ini peneliti membahas tentang metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian.

